

PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP PEMBERDAYAAN RUMAH TANGGA MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA

Fahmi

Relawan Dompok Dhuafa, Banten

Email: fahmi387159@gmail.com

Abstract

Poverty still occurs in the household space which causes poverty in a large community level. So it needs efforts to be able to tackle the problem of poverty in the household. One of them is by empowering poor household communities through enhancing the activities of Joint Group Enterprises (KUBE) involving social workers. With this empowerment, it is expected that social workers can carry out their functions and roles to supervise and monitor Joint Group Business actors. The method used is the literature study method with a variety of references that are still relevant. Then this paper produces the following discussion. First, what is the factor of poverty in the household, second, what is the most appropriate effort to empower poor household, and third, how the role of social workers in government programs towards Joint Group Enterprises (KUBE), where this program is one of the activities that can be utilized by poor households.

Keywords: *social worker; household; poverty; empowerment*

Abstrak

Kemiskinan masih terjadi pada ruang rumah tangga yang menyebabkan adanya kemiskinan. Salah satunya adalah dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat rumah tangga miskin melalui peningkatan kegiatan Usaha Kelompok Bersama (KUBE) yang melibatkan pekerja sosial. Tujuan studi ini yaitu menganalisa pemberdayaan melalui pekerjaan sosial dapat menjalankan fungsi dan peranannya untuk keberlanjutan KUBE. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai referensi yang masih relevan. Kemudian tulisan ini menghasilkan pembahasan sebagai berikut; pertama, faktor terjadinya kemiskinan pada rumah tangga; kedua, upaya apa yang paling tepat untuk memberdayakan masyarakat rumah tangga yang miskin, dan; ketiga, peran pekerja sosial dalam program pemerintah terhadap KUBE, dimana program ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa di manfaatkan oleh rumah tangga miskin.

Kata kunci: *Pekerja sosial; rumah tangga; kemiskinan; pemberdayaan.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan perosalaan yang menyangkut ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi tuntutan kehidupannya baik dari aspek kebutuhan biologis maupun sosial. Masalah kemiskinan ini, menjadi masalah yang telah terkenal sejak lama dan sulit untuk di selesaikan. Sebab permasalahan kemiskinan tersebut sangatlah kompleks, artinya tidak hanya permasalahan kurangnya kebutuhan pangan saja tapi juga kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sandang. Permasalahan kemiskinan, di Indonesia sendiri menjadi kasus yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas, karena masyarakat Indonesia masih terbilang besar masyarakatnya yang miskin. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2019 mencapai 25,14 juta. Dengan presentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 6,69% dan presentase penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 12,85% dan jumlah penduduk miskin diperkotaan mencapai 9,99 juta orang sedangkan dipedesaan mencapai 15,15 juta orang. (Suhariyanto, CNB Indonesia, 15/7/2019).

Meskipun jumlah penduduk miskin pada tahun ini mengalami penurunan dari sebelumnya yang sebesar 9,41% turun dengan 0,41% tapi pada intinya tetap saja permasalahan kemiskinan pada rumah tangga masih belum bisa diselesaikan. Selain itu banyaknya jumlah pengangguran menandai bahwa kemiskinan memang masih membelenggu masyarakat Indonesia. Beberapa jumlah usia muda yang mengalami pengangguran karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Sesuai badan pusat statistik mencatat tingkat pengangguran pada tahun 2019 mencapai 6,82 juta orang, dan tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan masih terdapat pada lulusan SD 2,65%, lulusan SMP 5,04%, lulusan SMK 8,63%, SMA 6,78% dan lulusan Universitas 6,24%. Dari data tersebut jelas bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan masih sulit di dapatkan.

Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan di Indonesia ini dirasakan sudah sangat mendesak dilakukan khususnya bagi keluarga miskin, karena adanya kondisi

yang menunjukkan beban hidup yang harus ditanggung oleh keluarga miskin yang semakin meningkat, pada dasarnya keluarga miskin memiliki kemampuan atau potensi yang ada pada diri mereka sebagai modal dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya walaupun dalam keadaan sangat minim atau terbatas.¹

Terdapatnya rumah tangga yang miskin, disebabkan adanya masalah seperti penghasilan rendah dibawah garis kemiskinan, tidak mempunyai untuk membiayai pengobatan salah satu anggota keluarganya, serta kurang mampu untuk membiayai anaknya di tingkat pendidikan. Sehingga rumah tangga yang miskin berhak untuk menerima pelayanan kesejahteraan sosial dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan.

Kemudian salah satu upaya untuk memperdayakan rumah tangga miskin sebagai mana yang telah direncanakan dan implementasikan pemerintah salah satunya berupa kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kegiatan yang sangat tepat untuk di tingkatkan. Sesuai keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang pelaksanaan pemberian bantuan sosial keluarga miskin maka pemberdayaan untuk rumah tangga miskin dapat dilaksanakan. Namun dalam kegiatan tersebut pemerintah mempunyai mekanisme pelaksanaan tersendiri, yaitu mesti adanya pembina teknis wilayah dengan pendampingannya disebut sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial tersebut berfungsi untuk memecahkan masalah, mengontrol pelaksanaan KUBE dengan baik dan lancar. Dari kegiatan tersebut setidaknya pemberdayaan rumah tangga miskin dapat mengurangi dan mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia dengan menyediakan kontribusi pendanaan, untuk meningkatkan motivasi keluarga miskin yang maju, meningkatkan interaksi dan kerjasama antar rumah tangga miskin dan mengembangkan ekonomi lokal serta budaya kewirausahaan.

¹ Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial dan Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin, dalam Fazra Raissa Wulandari. 2011. *Peran Pekerja Sosial Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Tangerang*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, hlm. 1-2

B. Pembahasan

b.1. Rumah Tangga Miskin

Rumah tangga adalah fungsional ekonomi-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan. Rumah tangga merupakan tempat hidup bersama seseorang yang saling mencintai dan saling mensejahterakan kehidupan sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sinilah awal mula kesejahteraan bisa dilaksanakan sebab di dalam rumah tangga terdapat sebuah tujuan bersama antar suami dan istri.

Menurut Elvira Handayani Jacobus, Dkk menyebut dari data Bps (2000) membagi rumah tangga menjadi dua yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah bahwa pembiayaan keperluan jika pengurusan sehari-hari dikelola bersama-sama. Rumah tangga khusus adalah sekelompok orang yang tinggal diasrama atau tempat tinggal yang pengurusan sehari-harinya diatur oleh yayasan atau badan. Misalnya asrama mahasiswa, lembaga kemasyarakatan, orang-orang yang berjumlah lebih dari 10 orang yang kos dengan makan, minum, asrama ABRI dan lain sebagainya.

Rumah tangga menjadi tolak ukur untuk mendeteksi permasalahan Kemiskinan, sebab kemiskinan pada masyarakat berangkat dari kehidupan pada rumah tangga. Kemiskinan pada rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Di antara faktor tersebut seperti adanya keluarga rumah tangga yang masih rendah memperoleh aspek pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pelayanan kesehatan sehingga rumah tangga miskin perlu adanya pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf ekonomi rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan tersebut termasuk dalam kebutuhan pangan dan sandang. Dan kebutuhan yang paling mendasar pada

rumah tangga adalah untuk keperluan mengkonsumsi makanan. Rumah tangga miskin pada umumnya dapat diklasifikasikan antara kelompok rumah tangga miskin pedesaan dan kelompok rumah tangga miskin di perkotaan. Dan keduanya terdapat perbedaan dalam pengeluaran pendapatan masing-masing rumah tangga miskin perkotaan maupun pedesaan.

Hasil penelitian Faturocman Marcelinus Molo di daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengeluaran di desa dan di kota tampak berbeda dengan jumlah pengeluaran yang lebih tinggi ditemukan di perkotaan. Hal ini terjadi untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pengeluaran yang berbeda secara mencolok antara desa dan kota antara lain ditemukan untuk protein. Konsumsi protein di kota kelihatan jauh lebih tinggi dibanding di desa. Hal serupa juga ditemukan pada pengeluaran konsumsi lain-lain. Data yang ini barangkali bisa diinterpretasi bahwa rumah tangga kota lebih banyak variasi dalam mengkonsumsi makanan. Sementara pengeluaran bukan makanan juga ada perbedaan pola antar desa dan kota. Rumah tangga desa membelanjakan uang cukup banyak untuk kesehatan, sementara di kota pengeluaran yang menonjol adalah untuk pendidikan. Itulah perbedaan kebutuhan masyarakat rumah tangga antar desa dan kota. Namun demikian, pada tulisan yang ingin saya sampaikan bahwa rumah tangga baik kota maupun desa pada intinya mereka mempunyai potensi serta keterampilan untuk di perdayakan melalui usaha kelompok bersama. Dengan demikian para rumah tangga miskin akan mendapatkan usaha ekonomi mandiri sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga. Sebagaimana kata Ayu Andria, dkk dalam usaha kelompok bersama petani padi bahwa pendapatan total rumahtangga petani padi dan suku bunga tabungan berpengaruh positif terhadap tabungan rumahtangga petani padi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pendapatan total rumahtangga petani padi dan suku bunga tabungan meningkat, maka jumlah tabungan rumahtangga petani padi akan bertambah.

Maka untuk melaksanakan kegiatan ini agar berjalan dengan baik maka sebagai

pekerja sosial mesti mengetahui mana rumah tangga yang termasuk miskin memenuhi kriteria untuk menerima Kelompok Usaha Bersama dan mana yang rumah tangga miskin tidak memenuhi kriteria kemiskinan.

Seorang rumah tangga dapat dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebenarnya batas ukuran kemiskinan itu sesuai pemenuhan kebutuhan dasar yang merujuk pada indikator dan garis kemiskinan.

Kemiskinan masyarakat terjadi dikarenakan adanya rumah tangga yang miskin, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga rumah tangga miskin belum dapat memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya.

Elvira Handayani Jacob, dkk menyatakan bahwa ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah.

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri misalnya seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
4. Berada dikawasan pedesaan atau dikawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu diperkotaan (slum area).
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

b. 2. Kemiskinan

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi perdebatan yang tidak pernah usai untuk didiskusikan. Persoalan utamanya adalah ketidakterpaduan mengenai ukuran dan standar kemiskinan. Implikasinya wacana kemiskinan menjadi multidefinisi. (Keppi Sukesu, 2015,154).

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal belahan dunia dan sangat memerlukan solusi yang multidimensional baik dari berbagai program pemerintah pusat maupun daerah yang sudah di usahakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

Nanga (2007:42), menyatakan bahwa fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi.

Selanjutnya terdapat empat faktor lain, penyebab kemiskinan menurut Chambers dalam Khosman dalam, dkk (2015:3) yaitu:

- a) kemiskinan absolut: bila pendapatnya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b) kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

- c) kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada ada bantuan dari pihak lain.
- d) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap meyebabkan suburnya kemiskinan.²

Untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep kemiskinan maka harus kita pahami terlebih dahulu makna dari sebuah kemiskinan.

Menurut Permensos No. 8 tahun 2012 fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pecaharian tetapi mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.³

Andi Muhammad Arif Haris menyebutkan bahwa pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang indikator kemiskinan yang standar dalam PERMENSOS No. 146 Tahun 2013 berikut ini.

- 1). Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencharaian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;

² Andi Muhammad Arif Haris, 2018, *Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial Edisi I, November 2018 ISSN: 2655-0911

³ Andi Muhammad Arif Haris, 2019, *Pengenalan Masalah Fakir dan Miskin di Kelurahan Binong Kecamatan Batungual Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi 2 Mei 2019: hlm.4

3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang di subsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik/ dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbina atau genteng /seng/asbes/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/ orang dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/ air hujan dan lainnya.

b.3. Pekerja Sosial

Menurut Andi Muhammad Arif Haris (2019), pekerja sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan perannya.

Selanjutnya pekerjaan sosial juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi sosial yang kondusif bagi kehidupan mereka misalnya terciptanya peluang dan kesempatan usaha, terbukanya akses dan jaringan usaha/kerja, adanya jaminan usaha dan informasi pasar. Sedangkan pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani masalah kemiskinan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat miskin, tapi juga diujukan kepada situasi-situasi sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Purwowibowo menyebut bahwa Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Profesi ini berfungsi untuk melakukan analisis kebijakan dan perencanaan kesejahteraan sosial, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial, mengembangkan sumber daya manusia, melakukan penyembuhan sosial, rehabilitasi sosial, mencegah timbulnya masalah sosial, memperdayakan kelompok rentan dan lain sebagainya.

Pekerjaan sosial di dalam usaha mencapai tujuannya, yaitu memecahkan permasalahan sosial dan meningkatkan kemampuan orang dalam berintraksi dengan orang lain maupun dengan sistem sumber perlu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (Pincus dan Minahann, 1973:15).

- a) Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Fungsi tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:
 - 1). Pekerja sosial mengidentifikasi dan mengadakan kontak dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi pelaksanaan tugas-tugas kehidupan.
 - 2). Pekerja sosial memberikan pemahaman, dorongan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang di landa kritis.

- 3). Pekerja sosial dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialaminya.
4. Pekerja sosial dapat membantu orang untuk menguji beberapa alternative pemecahan masalah dan memberikan informasi untuk membantu mengambil keputusan.
5. Pekerja sosial dapat mengkonfortasikan orang dengan realitas situasi mereka, dengan cara memberikan informasi yang dapat mengganggu keseimbangannya dan kemudian memotivasi mereka agar mau melaksanakan perubahan.
6. Pekerja sosial dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan untuk membantu individu merelisasikan aspirasi mereka dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁴

Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat berbentuk Kelompok Usaha Bersama yaitu melakukan pendamping sosial dan menjalankan peran yang meliputi: perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, fasilitator dan evaluator. (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial RI dalam Fazra Raissa Wulandari, 2011).

- a) Perencana, memerlukan visi berorientasi kedepan sebagai kekuatan pendorong dalam mengembangkan potensi dan peningkatan kemampuan. Pekerja sosial sebagai perencana bertugas menetapkan tujuan serta merumuskan perencanaan yang efektif, dengan memperoleh gambaran awal tentang struktur sosial ekonomi aktual masyarakat yang dapat mempengaruhi upaya pemberdayaan yang akan dilaksanakan. peran pekerja sosial dalam tahap ini yaitu menyiapkan petugas pekerja sosial untuk melakukan sosialisasi program, dan pembentukan KUBE, tidak hanya itu, akan juga bertugas mendata atau survei lokasi,

⁴ Andi Muhammad Aris Haris, 2018. *Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial Edisi I, November 2018, ISSN:2655-0911. Hlm 7-8

menyaksikan bantuan penyaluran, pembinaan berkala dan pelaporan pengembangan.

b) Pembimbing, yaitu pendamping sosial dituntut kemampuan dan keterampilan untuk mengajak, mengarahkan dan membina sehingga mereka mengerti, memahami dan dapat melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dalam melaksanakan aktivitas sosial ekonominya. c) pemberi informasi, yaitu memberikan penjelasan tentang gambaran umum program pemberdayaan, manfaat melakukan usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama dengan cara mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, kelembagaan dan sebagainya. d) Motivator, sebagai pekerja sosial harus dapat memberikan dorongan, merangsang untuk semangat maju dari ketertinggalan kepada anggotanya sehingga mereka dapat mengenali masalah dan kekuatan yang dimilikinya. Dan diharapkan mampu menumbuhkan sikap pola pikir yang dapat mengembangkan potensinya melalui upaya pemberdayaan yang dilaksanakan. e) fasilitator, pendamping sosial atau pekerja sosial mesti dapat memberikan fasilitas kemudahan baik berupa barang, peralatan, maupun ketentuan, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan lainnya. Dan yang terakhir adalah f) evaluator, yaitu pendamping sosial memberikan penilaian, saran, dan masukan, terkait kegiatan yang sedang ataupun sudah berjalan guna meningkatkan kualitas program kegiatan tersebut.

b.4. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. (Suharto

Edi 2006). Sennect, Cabb (1972) dan Conway menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.

Menurut M.J Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi menjelaskan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengutarakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber positif produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusannya yang mempengaruhi mereka.

Demikian dengan permasalahan kemiskinan, yang sebenarnya bisa kita atasi bersama melalui konsep pemberdayaan rumah tangga miskin. dalam pemberdayaan ini, tentu dapat membantu dan sebuah cara yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan ini mengangkat atau mendorong potensi-potensi atau keterampilan masyarakat yang rumah tangga miskin untuk bersatu padu, bekerjasama mewujudkan meningkatkan pendapatan hidup mereka. Dengan pemberdayaan ini di harapkan dapat mempercepat tujuan penanggulangan kemiskinan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, karena dalam pemberdayaan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dituntut untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat rumah tangga miskin, juga membela rumah tangga miskin dalam berbagai aspek yang positif. Rumah tangga yang miskin mesti dapat perhatian dan dilindungi serta pendampingan supaya memiliki kekuatan untuk meraih sumber ekonomi yang lebih baik. Salah satu pemberdayaan tersebut berperan penting juga untuk mengantisipasi atau menjaga terjadinya pengangguran pada rumah tangga.

Pemberdayaan bukan berarti dalam bentuk materi saja, tetap dalam bentuk non materi juga, seperti meningkatkan motivasi, pendidikan dan lainnya. Pemberdayaan sebagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang merupakan bagian integral dari pembangunan untuk mewujudkan taraf kesejahteraan yang merata atau menyeluruh. Hal ini sesuai dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan Undang-Undang No 6/1974 Pasal 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Bentuk dari pemberdayaan oleh pemerintah yaitu Kelompok Usaha Bersama, pada pemberdayaan itu tentu perlu adanya strategi salah satunya yaitu tahapan pemberdayaan. Tahapan pemberdayaan ini gunanya untuk mengukur serta mengendalikan agar program pemberdayaan dari pemerintah bisa berjalan sesuai harapan. Tahapan pemberdayaan tersebut di antaranya adalah:

1. Tahapan persiapan, pada tahapan ini mempunyai dua persiapan. Yaitu persiapan untuk petugas pengelola pemberdayaan. Petugas ini diharapkan mempunyai latar belakang yang sesuai sehingga bisa untuk dilakukan pelatihan awal untuk menyamakan persepsi mengenai program pemberdayaan yang dapat dikerjakan di daerah tersebut. Selanjutnya, penyiapan lapangan, yaitu prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat. Untuk hal ini, langkah baiknya melakukan survei tempat terlebih dahulu.
2. Tahapan Pengkajian, pada tahapan pengkajian ini bisa melibatkan tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengkaji sesuai atau tidaknya program untuk dilaksanakan. Agar program ini dapat teridentifikasi kelebihan dan kekurangannya.
3. Tahapan pemformulasi rencana aksi, yaitu petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan ide gagasan mereka dalam

bentuk tertulis atau disebut proposal.

4. Tahapan evaluasi, yaitu proses pengawasan dari petugas maupun dari warga terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Pada tahapan evaluasi ini berguna untuk mengukur ketercapaian dan kekurangan untuk dapat diperbaiki menjadi lebih baik.
5. Tahapan terminasi, yaitu tahap pemutusan setelah masyarakat sudah mandiri dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Ardito Bhinadi (2017,5) Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kelembagaan, baik lembaga kemasyarakatan desa, maupun lembaga fungsional, lembaga perekonomian yang ada di desa. Sebab lembaga sehat dan kuat menjadi modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena melalui kelembagaan proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif. Disamping itu dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat.

b.5 Meningkatkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Selama ini pemerintah telah berusaha untuk maksimal menangani masalah kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan yang di antaranya adalah “GERDU TASKIN” yaitu Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, BLT yaitu Bantuan Langsung Tunai, kemudian PPK yakni Proyek Pengembangan Kecamatan namun semua itu masih di anggap belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan sehingga pemerintah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang merupakan

program unggulan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Program KUBE tersebut merupakan bantuan yang bersifat stimulan yang bentuk bantuannya tergantung dari permintaan masyarakat itu sendiri dan bantuannya itu disesuaikan dengan keadaan dalam lingkungannya dan dijalankan secara berkelompok dari keluarga-keluarga yang kurang mampu.

KUBE di bentuk oleh kelompok warga atau keluarga yang telah dibina melalui proses kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan salah satu metode pendekatan proses pemberdayaan.

Pada dasarnya program KUBE ini di harapkan agar masyarakat rumah tangga miskin dapat meningkatkan dan memperbaiki perekonomian keluarganya, serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dinegara ini. Program KUBE sendiri sudah banyak dilakukan oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa. Seperti halnya di daerah Jawa Timur, di Jawa Timur KUBE telah dilaksanakan di beberapa daerah Kabupaten dan kota, salah satunya adalah di Surabaya, di Surabaya KUBE berjalan di beberapa tempat termasuk di antaranya adalah kelurahan menanggal kecamatan Gayungan.

Menurut Tukiman (2010) menyatakan bahwa KUBE dikelurahan Menanggal kecamatan Gayungan berjalan dengan baik namun masih saja ada kendala-kendala atau kemacetan dalam program KUBE disini, KUBE masih dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin dikelurahan Menanggal, namun dengan program KUBE disini sangatlah membantu mereka untuk memulai sedikit lebih maju dan lebih baik sehingga mereka bisa menjalankan kehidupannya walaupun hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok. KUBE dikelurahan Menanggal berjumlah 5 kelompok yang perkelompokannya terdapat 10 orang dan usaha yang mereka geluti adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di antaranya adalah seperti jualan gorengan,

bakso, rujak, kue-kue, dan lain sebagainya, yang anggarannya berasal dari Dinas Sosial Propinsi.

KUBE sebagai program yang paling tepat untuk pemerintah tingkatkan, adapun beberapa kendala yang terjadi selama ini dari program tersebut tentu itu merupakan kekurangan pengawasan pemerintah serta pekerja sosial yang masih belum maksimal mengontrol kegiatan program tersebut. Yang pada akhirnya jika kegiatan program ini lepas dari kendali atau kontrol dari lembaga pemerintah yakni dinas sosial juga pekerja sosial masyarakat tentunya mereka para pemegang KUBE tersebut akan ada kesempatan untuk menjual atas pemberian KUBE tersebut. Hal itu tentu perlu peran pemerintah untuk memaksimalkan program tersebut dengan menguatkan struktural pekerja sosial serta pengawasan. Karena dalam konsep pemberdayaan sendiri serta konsep KUBE sudah lengkap dan sistematis, tinggal bagaimana orang yang melaksanakan itu yang perlu diperbaiki lagi.

Beberapa tujuan KUBE ini antaranya yaitu untuk peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam berkelompok, meningkatkan pendapatan atau kemampuan anggota KUBE untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang disertai meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan serta lainnya. juga pengembangan usaha dan meningkatkan kepedulian sosial para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

C. Kesimpulan

Kemiskinan menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai untuk di bahas. Sebab kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks meliputi segala aspek, baik budaya, sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Kemudian kemiskinan juga sangat rumit di petakan sebab kemiskinan memiliki indikator serta garis kemiskinan yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya Indonesia masyarakatnya

mengalami kemiskinan salah satunya berangkat dari kemiskinan yang terjadi dari rumah tangga, hingga kemiskinan tersebut menjadi luas apabila semua rumah tangga atau penduduk mengalami kemiskinan. Dengan demikian, meskipun persoalan kemiskinan belum bisa diselesaikan dengan tuntas, tapi pemerintah berusaha keras dengan berbagai macam cara dengan kebijakannya untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan harus menjadikan rumah tangga menjadi objek sebagai sasaran untuk di perhatikan serta di perdayakan. Kebanyakan masalah kemiskinan pada rumah tangga dapat menimbulkan permasalahan besar hingga menambah angka kemiskinan apabila tidak teratasi dengan baik. Di dalam rumah tangga tersebut dimana banyak permasalahan kesejahteraan sosial. Di antaranya rendahnya pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan dan lainnya sehingga menimbulkan jumlah pengangguran.

Karena itu, untuk mengurangi dan mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan memperdayakan rumah tangga miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama, melihat bahwa rumah tangga miskin sebenarnya memiliki potensi dan keterampilan untuk bisa dijadikan sebagai peningkatan ekonomi lokal dan mendorong mereka agar memiliki pendapatan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama yang dikelola dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif dan lainnya merupakan program yang sangat tepat untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin yang tinggi, program KUBE juga mendidik masyarakat miskin untuk berusaha dan dengan bantuan ini dapat memotivasi mereka untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Namun dalam hal Kelompok Usaha Bersama mesti ada pendampingan agar

tidak terkesan membiarkan saja. Maka dibutuhkan seperti penyuluhan penyuluhan pada saat pengelolaan dijalankan dan memberikan keterampilan sebelum mereka mengelola usaha atau mengajari mereka keterampilan dalam memajukan usaha yang mereka kelola, bukan hanya di serahkan kepada pengurus lokal untuk mengawasi mereka. Juga peran pekerja Sosial mesti benar-benar bisa menjalankan peranan sosialnya kepada masyarakat miskin. supaya program pemberdayaan masyarakat miskin tersebut bisa berjalan dengan baik. Juga pemerintah khususnya kementerian sosial serta dinas sosial agar selalu tetap menjalankan konsep pemberdayaan masyarakat miskin dan program KUBE agar tidak begitu saja melepaskan tanggung jawabnya tanpa pengontrolan yang sistematis serta evaluasi-evaluasi. Pada intinya konsep kelompok usaha bersama ini sudah cukup baik untuk ditingkatkan lagi dan bisa diterapkan dengan merata diseluruh daerah. Tinggal bagaimana untuk menguatkan saja pelaku atau petugas baik pemerintah, pekerja sosial dan penanggung jawab tersebut berkomitmen untuk sama-sama menjaga dan meningkatkan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, Group Penerbitan CV Budi Utama.

Sekesi, Keppi. 2015. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Journal article

Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Bantuan Jaminan Sosial dan Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin dalam Wulandari, Fazra Raissa. 201. *Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama dan Lembaga Keuangan Mikro* 2004,.11.

Jacobus, Elvira Handayani, Dkk. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi" Vol.19 No.7: 6

Jacobus, Elvira Handayani, Dkk. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.7.2018

- Haris, Andi Muhammad Arif. 2018. *Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*. Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi I, November 2018: 5-6
- Haris, Andi Muhammad Aris, 2018. *Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial Edisi I, November 2018, ISSN:2655-0911. 7-8
- Maspaitella, M.J, Nancy Rahakbauwi. 2014. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. Universitas Kristen Indonesia. 159
- Pincus, Allen dan Anne Minahan. 1973. *Social Work Practice: Modal and Methode*. Itasca, Illinois :Peacock Publisher
- Molo, Faturocman Marcelinus. 1994. *Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta*,
- Nanga, Muana dalam Iskandar, 2008. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa*. 132
- Elinur, Ayu Andria, Jumatri. 2018. *Kajian Ekonomi Rumah tangga Petani Padi Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*; Jurnal Agribisnis Vol 20 No. 1 Juni 2018 ISSN P: 1412 - 4807 ISSN O: 2503-437.109
- Suharto Edi dalam M.J Nancy Rahakbauwi. 2014. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. Universitas Kristen Indonesia.
- Tukiman, 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Kube): Studi Deskriptif tentang Usahan Ekonomi Produktif (UEP) dikelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan*. FISIP UPN. Jawa Timur, 1005, Jurnal Aplikasi Manajemen/ Volume 8, Nomor 4, November 2010
- Purwowibowo. *Peran Pekerja Sosial dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Millennium*. 201